

Peran Ormas Bang Japar dalam Meningkatkan Jumlah Suara Fahira Idris pada Pemilihan DPD Tahun 2024

Alma Nur Syahbani¹, Restu Rahmawati²

Program Studi Ilmu Politik^{1,2}

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: alma.nursyahbani@gmail.com



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Research Article

Kata Kunci: Patron Klien, Ormas, Fahira Idris, Bang Japar, Pemilihan DPD

Keyword : Client Patron, Mass Organization, Fahira Idris, Bang Japar, DPD Election

Article History

Dikirim : 06 Desember 2024

Diterima: 01 Januari 2025

Dipublikasi: 27 Februari 2025

Penelitian ini mengkaji tentang peran basis massa dalam pemenangan Fahira Idris pada pemilu tahun 2024. Alasan penelitian ini dilakukan berawal dari konsistensi kemenangan Fahira Idris dalam 3 periode pemilu yang diikutinya. Teori yang digunakan adalah teori patron klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator dianalisis melalui pendekatan partisipasi elektoral dan non-elektoral tersebut terbukti saling terhubung dan menjadi dasar kuat bagi hubungan Fahira dengan Bang Japar. Ketimpangan kekuasaan terlihat dari posisi Fahira sebagai penyedia sumber daya dan akses politik. Keterikatan personal dibangun melalui komunikasi informal dan perhatian simbolik yang menumbuhkan loyalitas emosional. Ketergantungan tampak dalam akses terhadap program dan dukungan politik Fahira yang dimanfaatkan Bang Japar. Hubungan timbal balik bersifat adaptif dan pragmatis, namun tetap dilandasi oleh norma loyalitas sosial yang memperkuat stabilitas relasi.

ABSTRACT

This study examines the role of the mass base in Fahira Idris' victory in the 2024 election. The rationale for this research stems from Fahira Idris's consistent victories in the three election periods she participated in. The theory used is the patron-client theory. The results show that the four indicators analyzed through the electoral and non-electoral participation approaches are proven to be interconnected and form a strong foundation for Fahira's relationship with Bang Japar. The imbalance of power is evident in Fahira's position as a provider of resources and political access. Personal ties are built through informal communication and symbolic attention that foster emotional loyalty. Dependence is evident in access to Fahira's programs and political support that Bang Japar utilizes. The reciprocal relationship is adaptive and pragmatic, but remains based on social loyalty norms that strengthen the stability of the relationship.

Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang peran basis massa dalam pemenangan Fahira Idris pada pemilu tahun 2024. Alasan penelitian ini dilakukan berawal dari konsistensi kemenangan Fahira Idris dalam 3 periode pemilu yang diikutinya. Fenomena kemenangan Fahira Idris sebagai calon perseorangan selama 3 periode memunculkan sebuah pertanyaan penting mengenai strategi yang digunakan dalam menghadapi perubahan dinamika politik yang terjadi. Hadirnya basis massa yang memberikan loyalitas dukungan kepada Fahira Idris menjadi salah satu dari strategi yang digunakan oleh Fahira. Hal ini memicu penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran basis massa dalam memberikan dukungan untuk pemenangan Fahira Idris dalam pemilu 2024.

Pasca reformasi tahun 1998, membawa Indonesia mengalami transformasi mendalam pada sistem ketatanegaraannya. Perubahan ini ditandai dengan amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali, antara tahun 1999 – 2002. Amandemen – amandemen yang ada memperkenalkan berbagai prinsip baru yang fundamental dalam tata kelola negara, termasuk pemisahan kekuasaan yang jelas, sistem *checks and balances*, serta penegakan supremasi hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik politik secara adil (Isra, 2010). Dalam era reformasi ini, muncul berbagai lembaga negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Lembaga-lembaga tersebut memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara efektif (Nastain dan Nugroho, 2022). Dengan begitu, maka keberadaan lembaga-lembaga ini adalah hasil dari perubahan struktural yang bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD. DPD dibentuk atas dorongan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, khususnya untuk menciptakan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Lembaga ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan berbangsa, serta memperkuat Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Pada bulan November 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk membentuk lembaga baru ini, yang bertujuan untuk memberikan perwakilan yang lebih adil bagi masyarakat daerah. DPD berfungsi untuk mewakili aspirasi daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam UUD 1945 (Amandemen IV), DPD memiliki kewenangan dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Anggota DPD dipilih secara individu dan mewakili kepentingan daerah dalam proses pembuatan kebijakan nasional (Jamil, 2022).

Dalam konteks Indonesia, loyalitas basis massa berkaitan dengan dinamika hubungan patron-klien yang telah lama menjadi salah satu ciri khas utama dalam praktik politik dan sosial, terutama di tengah masyarakat yang masih sangat mengandalkan struktur informal dalam kehidupan sehari-harinya. Hubungan ini berkembang kuat dalam situasi di mana akses terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial tidak merata, sehingga individu atau kelompok tertentu membutuhkan figur patron sebagai perantara untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan kesempatan. Basis massa dalam konteks ini berfungsi sebagai kumpulan klien yang memberikan dukungan kolektif kepada patron dalam bentuk loyalitas politik, mobilisasi sosial, hingga penguatan legitimasi kekuasaan. Hubungan patron-klien di Indonesia sering kali tidak hanya berdimensi material, tetapi juga bersifat emosional dan simbolik, membentuk ikatan kuat yang ditopang oleh solidaritas komunitas, identitas kultural, dan norma gotong royong (Hidayat, 2019).

Sejalan dengan pembahasan mengenai indikator patron-klien yang dikemukakan oleh James Scott (1972) seperti hubungan timbal balik, ketimpangan kekuasaan, keterikatan personal dan non-formal, serta ketergantungan klien terhadap patron, dinamika ini juga terlihat dalam bagaimana basis massa dimobilisasi untuk mendukung kepentingan politik patron. Patron, yang biasanya merupakan elite politik atau tokoh berpengaruh, memberikan berbagai bentuk insentif kepada basis massa melalui jaringan organisasi atau komunitas lokal, sedangkan massa memberikan balas jasa berupa suara, legitimasi, dan partisipasi aktif dalam aktivitas sosial politik. Dengan demikian, basis massa tidak

hanya menjadi instrumen pasif, melainkan juga bagian integral dari jaringan patron-klien yang mempertahankan keseimbangan pertukaran manfaat, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan reproduksi kekuasaan dalam sistem politik Indonesia

Pada pemilu 2024, berbagai basis massa menunjukkan perannya untuk kemenangan calon-calon yang didukungnya antara lain, Dailami Firdaus yang mendapat dukungan dari FBR, Forkabi dan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) (Riaunews.com, 2023). Lalu, Achmad Azran yang didukung oleh Forum karang taruna Jakarta Timur, Dewan Masjid Indonesia serta FORKABI (Farida, 2024). Selain itu, Fahira Idris juga mendapat dukungan basis massa antara lain terdiri dari, Ormas Bang Japar, Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT), Ormas Kembang Latar, Forum Senam Tera, dan Sahabat Fahira Idris. Peran aktif dan dukungan yang diberikan oleh basis massa tersebut menunjukkan bagaimana Ormas dapat menjadi kekuatan politik yang dapat membantu calon-calon dalam pemilihan umum.

Berdasarkan data di atas terdapat keunikan pada basis massa pendukung Fahira Idris, yaitu hadirnya Ormas Bang Japar yang setia memberikan dukungannya selama 2 periode pemilu yang diikutinya. Bang Japar merupakan akronim dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara yang terbentuk pada tahun 2017. Organisasi yang hadir karena adanya gerakan kepedulian terhadap pengawalan jalannya pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Program kegiatan yang dilakukan oleh Bang Japar adalah sebagai pengawal (*checks and balances*) jalannya pemerintahan, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya terlebih budaya Betawi (bangjapar.org, 2017). Maka, melalui program tersebut Bang Japar turut aktif membantu dalam program kampanye yang dilakukan Fahira Idris pada pemilu 2024.

Tinjauan Pustaka

Patron Klien

Dalam artikelnya yang berjudul *Patron – Client Politics and Political Change in Southeast Asia*,

James Scott (1972) menjelaskan bahwa hubungan patron-klien adalah suatu fenomena hubungan antara dua orang atau lebih yang secara umum melibatkan pola hubungan yang tidak setara, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya, klien membala pemberian tersebut dengan memeberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan lancar, diperlukan adanya indikator-indikator tertentu di dalamnya seperti;

1. Ketimpangan kekuasaan (*asymmetrical power relationship*)

Indikator pertama yang ditekankan Scott adalah ketimpangan kekuasaan atau *asymmetrical power relationship*. Meskipun terdapat pertukaran manfaat, hubungan patron-klien tetaplah bersifat hierarkis. Patron memiliki posisi dominan dibandingkan klien, baik dalam hal kekuasaan ekonomi, politik, maupun sosial. Patron umumnya adalah individu atau kelompok yang memiliki kelebihan sumber daya strategis yang dibutuhkan oleh klien, seperti kekayaan dan koneksi politik. Ketimpangan ini menciptakan relasi subordinatif, di mana klien berada dalam posisi ketergantungan terhadap patron untuk memenuhi kebutuhan atau melindungi kepentingannya. Klien, meskipun berada dalam posisi lebih lemah, menerima ketimpangan tersebut karena menyadari bahwa perlindungan dan bantuan yang diberikan patron lebih besar daripada potensi yang bisa mereka capai sendiri dalam situasi sosial yang penuh ketidakpastian. Ketimpangan kekuasaan ini juga menjelaskan mengapa dalam banyak hubungan patron-klien, terdapat penggunaan simbol-simbol dominasi seperti slogan, komando, atau struktur organisasi yang menegaskan supremasi patron atas kliennya yang dilihat dalam tiga aspek yaitu, sumber daya (*resource dimension*), aspek pengaruh keputusan (*decision-making influence*), dan aspek legitimasi sosial (*social legitimacy*).

2. Keterikatan personal dan non-formal (*personal and informal bond*). Hubungan patron-klien tidak

semata-mata diatur oleh kontrak formal atau institusi resmi, melainkan dibangun melalui kedekatan emosional, interaksi sosial yang intens, serta penggunaan mekanisme informal seperti hadiah dan perhatian personal. Hubungan ini tidak bergantung pada struktur legal formal, tetapi lebih pada norma tidak tertulis seperti rasa hutang budi (*debt of gratitude*) dan solidaritas kelompok. Menurut Scott, ikatan personal ini memainkan peranan vital dalam menjaga stabilitas hubungan antara patron dan kliennya.

3. Ketergantungan klien terhadap patron (*client dependence*)

Indikator ketiga adalah ketergantungan klien terhadap patron atau *client dependence*. Klien dalam hubungan patron-klien biasanya berada dalam posisi membutuhkan patron untuk mengakses berbagai sumber daya yang tidak dapat mereka capai sendiri. Ketergantungan ini dapat berupa kebutuhan terhadap bantuan ekonomi dan akses terhadap kekuasaan politik.

4. Hubungan timbal balik (*reciprocity*)

Indikator keempat dalam teori patron-klien menurut James Scott adalah adanya hubungan timbal balik atau *reciprocity*. Dalam konteks ini, hubungan patron-klien bukanlah hubungan sepihak di mana hanya satu pihak yang memberi atau menerima, melainkan sebuah pertukaran dua arah yang berkelanjutan. Patron menyediakan berbagai bentuk dukungan kepada klien, baik berupa sumber daya ekonomi, maupun akses terhadap kekuasaan. Sebagai balasannya, klien menawarkan kesetiaan politik, dukungan kerja, atau bentuk dukungan lain yang dibutuhkan patron untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Dalam pandangan Scott suatu relasi kekerabatan yang menciptakan pola patron klien merupakan hasil dari proses sosialisasi seseorang dalam hidupnya, dimana dalam suatu hubungan sosial terkandung di dalamnya rasa saling percaya (*trust*) yang dapat dimanfaatkan olehnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menciptakan profit. Hubungan ini juga di dasari oleh sanksi-sanksi yang ada di dalam sistem kekerabatannya ataupun oleh sanksi-sanksi dari masyarakatnya. Jika ada kerabat yang tidak bertindak seperti yang diharapkan oleh kerabat lainnya atau tindakannya dianggap tidak sesuai dengan aturan-aturan

yang berlaku, sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan. Ini berbeda dengan hubungan persahabatan yang instrumental, yang terjadi karena masing-masing pihak saling mempunyai kepentingan dan masing-masing juga bertindak dan dipandang sebagai suatu alat penghubung yang potensial ke orang-orang lain di luar hubungan antar dua pihak ini. Masing-masing individu disini merupakan sponsor bagi yang lain (Scott, 1972).

Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan segala bentuk perkumpulan di antara warga negara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun kebudayaan, yang membentuk lembaga atau paguyuban (Sjamsuddin, 1998). Menurut Riswandha Imawan (1996), Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam politik dan secara bebas menyampaikan aspirasi politik mereka kepada partai politik yang ada. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan dianggap mendekati bentuk ideal dari sebuah Ormas di Indonesia.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah ada sejak masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, salah satu Ormas yang berperan sebagai oposisi adalah Sarikat Islam, yang didirikan oleh Oemar Said Tjokroaminoto pada 10 September 1912. Selama penjajahan Jepang, Ormas yang aktif dalam memobilisasi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengusir penjajah dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk organisasi politik bernama Poesat Tenaga Rakyat (Poetera), yang didirikan pada 9 Maret 1943 (Dhakidae, 1991).

Pada masa pasca-kemerdekaan, yang meliputi periode Demokrasi Parlementer (1949-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Demokrasi Pancasila (1965-1997), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda terkait peran dan hubungannya dengan partai politik serta pemerintah. Peran Ormas, yang berfungsi sebagai salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, mengalami perubahan seiring perubahan sistem politik (Pamungkas, 2011).

Pada masa Demokrasi Parlementer, peran Ormas cukup besar, di mana mereka memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan dalam menyalurkan nilai-nilai politik kepada masyarakat. Ormas dari berbagai sektor, seperti sosial, kebudayaan, dan ekonomi, aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur politik. Partisipasi Ormas di masa ini dianggap tinggi karena mereka memiliki kebebasan yang lebih besar untuk berhubungan dengan partai politik dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan negara (Feith dan Castle, 1998). Namun, selama masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, peran Ormas dalam politik mengalami penurunan signifikan. Di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, pengaruh Ormas dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan partai politik menjadi sangat terbatas. Meskipun Ormas tetap ada, perannya dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat secara umum berada pada kategori yang rendah. Pemerintah pada masa itu cenderung lebih sentralistik dan otoriter, sehingga ruang gerak Ormas untuk mempengaruhi kebijakan menjadi sempit (Feith dan Castle, 1998). Demikian juga, pada masa Demokrasi Pancasila, di bawah rezim Orde Baru, Ormas hanya memiliki peran yang kecil dalam proses politik. Mereka seringkali dibatasi atau diatur dengan ketat oleh pemerintah, yang menginginkan kontrol penuh atas aktivitas politik dan sosial di negara tersebut. Sebagai hasilnya, Ormas lebih difungsikan sebagai pendukung kebijakan pemerintah daripada sebagai entitas independen yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif (Lili, 2017).

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, peneliti akan melakukan eksplorasi mendalam dengan bantuan informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang valid mengenai fenomena yang sedang dikaji. Topik yang diangkat dalam penelitian deskriptif ini memiliki nilai ilmiah yang bersifat faktual, bukan sekadar opini, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan diskusi yang konstruktif.

Penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi sebagai

metode utama. Ketiga metode ini dapat diintegrasikan melalui triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan. Proses pengumpulan data seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan, mengingat berbagai faktor dan kendala yang mungkin dihadapi dalam upaya memperoleh data yang komprehensif.

Setelah melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dan pengkajian data sekunder, tahap selanjutnya adalah analisis data dan pembahasan hasil wawancara. Creswell (2016) mendefinisikan analisis data sebagai proses sistematis dalam mencari dan menyusun informasi yang diperoleh. Proses ini melibatkan enam tahapan: pelaksanaan wawancara, pembacaan menyeluruh, analisis pola, penggabungan deskripsi dengan tema penelitian, pemilihan informasi krusial untuk dianalisis, dan penarikan kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Ormas Bang Japar terhadap Elektabilitas Fahira Idris pada Pemilu 2024

Dalam teori patron klien yang dikembangkan James C. Scott (1972), ketimpangan kekuasaan atau *asymmetrical power relationship* merupakan unsur kunci yang mendasari keberlangsungan hubungan patron klien. Ketimpangan ini mengacu pada kondisi dominan patron terhadap kliennya pada sektor ekonomi, politik, dan sosial. Hubungan ini bukan merupakan hubungan antar dua pihak yang setara, melainkan, patron menempati posisi dominan yang mampu menentukan arah, perilaku, dan keputusan klien. Sementara itu, klien berada dalam posisi subordinat, bergantung, dan terikat pada patron untuk memenuhi kebutuhan dasar atau aspirasi politiknya.

Dalam praktik politik di Indonesia, ketimpangan kekuasaan dalam hubungan patron klien tidak hanya berlangsung di tingkat elit, tetapi juga melibatkan berbagai elemen sosial, termasuk organisasi masyarakat (ormas). Fenomena ini terlihat dalam hubungan antara Fahira Idris, sebagai seorang senator DPD RI dapil DKI Jakarta dan Ormas Bang Japar sebagai sebuah organisasi masyarakat berbasis komunitas. Kedudukan Fahira Idris sebagai patron didukung oleh status politik, kapasitas

ekonomi dan pengaruh sosialnya yang kuat. Sebagai seorang anggota DPD RI yang telah terpilih dua periode secara berturut-turut, Fahira Idris memiliki akses langsung terhadap institusi negara, saluran legislasi, dan jaringan birokrasi. Fahira Idris memiliki kapabilitas untuk mengartikulasikan kepentingan publik secara langsung di level kebijakan.

Temuan tersebut menjelaskan bahwa Fahira memiliki akses langsung untuk menyampaikan suatu rekomendasi, dalam hal ini mengenai target pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi wilayah yang disampaikan langsung oleh Fahira dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada bulan Mei tahun 2025. Akses seperti yang digambarkan dalam penjelasan di atas, tidak dimiliki oleh para anggota ormas Bang Japar. Sebagai bagian dari masyarakat sipil akar rumput, anggota ormas Bang Japar hanya dapat menjangkau kanal kekuasaan tersebut melalui figur patron. Dengan begitu, terjadi ketimpangan dalam kontrol dan akses terhadap ruang politik formal. Patron memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan, sementara klien hanya menjadi perpanjangan tangan dalam mengumpulkan serta mendistribusikan kerangka rekomendasi tersebut di tingkat sosial-komunal.

Selain itu, pada faktor kapasitas ekonomi, kedudukan Fahira sebagai figur politik nasional menjadikannya memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan pendanaan yang tidak dimiliki oleh kliennya. Salah satu sumber pendanaan yang dimilikinya berasal dari bisnis yang dimiliki oleh keluarganya, seperti Nabila Parcel Bunga Internasional, Aries Shooting Club dan PT. Aries Mandiri Indonesia. Berkat kepemilikan bisnis tersebut juga menjadikan Fahira untuk dapat menduduki posisi Ketua Asosiasi Pengusaha Parcel Indonesia (APPI) dan Ketua Umum DPP Saudagar Muda Minang (Idris, 2025). Berbanding terbalik dengan anggota ormas Bang Japar yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut menciptakan relasi yang bersifat dependen, di mana akses terhadap sumber daya ekonomi tidak bersifat setara atau merata. Dalam perspektif teori patron klien (Scott, 1972), kapasitas ekonomi dapat menjadi alat dominasi halus, karena ketimpangan struktural dalam hal ekonomi akan membuat klien memiliki posisi tawar yang

rendah bagi patronnya.

Faktor lain yang memperkuat ketimpangan kekuasaan juga terlihat dalam pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang dimiliki Fahira Idris juga memperlihatkan ketimpangan akses terhadap media komunikasi dan ruang-ruang representasi. Fahira Idris memiliki kanal publikasi yang luas dan pengikut yang besar di media sosial. Fahira memiliki beberapa kanal media sosial seperti media sosial Instagram dengan 2,8 juta pengikut, media sosial X dengan 28 ribu pengikut, serta media publikasi yang dinamakan “Fahira Idris” (Fahiraidris.id, 2025).

Salah satu aspek fundamental dalam teori patron klien yang dikemukakan oleh James C. Scott adalah ketergantungan klien terhadap patron. Ketergantungan ini mencerminkan relasi yang tidak setara, di mana posisi klien cenderung berada dalam struktur subordinat akibat ketidakmampuannya mengakses sumber daya secara mandiri. Dalam konteks ini, patron menjadi aktor sentral yang menyediakan akses terhadap berbagai bentuk dukungan, baik ekonomi maupun politik. Dalam hubungan antara Fahira Idris sebagai patron dan ormas Bang Japar sebagai klien, bentuk-bentuk ketergantungan tersebut dapat diamati secara nyata dalam praktik sosial politik yang berlangsung. Ketergantungan klien muncul bukan hanya karena peran patron sebagai penyedia sumber daya, tetapi juga karena kemampuan patron membuka akses terhadap kekuasaan politik yang sulit dijangkau oleh klien secara independent. Oleh karena itu, pembahasan dalam sub bab ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana indikator ketergantungan klien dimanifestasikan melalui dua aspek utama, yakni akses terhadap sumber daya ekonomi dan akses terhadap kekuasaan politik.

Pertama, dalam aspek terhadap sumber daya ekonomi, ormas Bang Japar sebagai entitas sosial yang berbasis komunitas sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan dan fasilitas kegiatan. Dalam konteks ini, keberadaan Fahira Idris sebagai patron membuka akses terhadap sumber daya lebih besar, baik berupa dukungan logistik dan fasilitas terhadap keberlangsungan program kerja ormas Bang Japar.

2. Hubungan Timbal Balik (*reciprocity*) dalam Hubungan Fahira Idris dan Ormas Bang Japar

Dalam teori patron klien yang dikemukakan oleh James Scott (1972), salah satu indikator utama yang menunjukkan keberlangsungan hubungan antara patron dan klien adalah timbal balik (*reciprocity*). Hubungan ini tidak sekadar menunjukkan dominasi patron terhadap klien, tetapi juga keterlibatan aktif klien dalam memberikan sesuatu sebagai balasan atas dukungan yang diterima. Hubungan ini berlangsung dalam kerangka pertukaran dua arah, meskipun pada sifatnya tidak setara dalam hal kekuasaan, sumber daya dan posisi sosial, tetapi tetap saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Relasi timbal balik tersebut terlihat dalam hubungan antara Fahira Idris sebagai patron dengan ormas Bang Japar sebagai klien politik sosial yang memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan dukungan di masyarakat.

Fahira Idris sebagai patron memberikan sejumlah keuntungan kepada ormas Bang Japar yang meliputi bantuan ekonomi dan akses terhadap kekuasaan politik. Dalam bentuk bantuan ekonomi, patron menyediakan dukungan seperti yang dijelaskan dalam indikator sebelumnya, yaitu bantuan logistik untuk penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari bazaar UMKM, bantuan kegiatan bakti sosial dan keagamaan. Kegiatan seperti bazaar UMKM yang melibatkan anggota ormas Bang Japar bukan hanya bentuk dukungan ekonomi, tetapi juga membuka ruang sosial yang memperkuat posisi kelompok dalam struktur komunitas masyarakat di tiap wilayahnya. Selain itu, akses terhadap kekuasaan ditunjukkan dengan peran fasilitatif Fahira dalam mempertemukan ormas Bang Japar dengan aktor politik lainnya, misalnya melalui jalanan politik praktis dalam pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono pada PILKADA DKI Jakarta tahun 2024, jalanan advokasi dengan anggota DPRD seperti Muhammad Thamrin dari Komisi E, serta jalanan untuk mencari dewan penasehat seperti Desie Christyana Sari anggota DPRD Komisi E.

Sementara itu, ormas Bang Japar sebagai klien memberikan kontribusi bagi patron yang diwujudkan dalam bentuk kesetiaan politik dan dukungan sosial. Seperti halnya, dalam hal kesetiaan

politik yang terinternalisasi dalam struktur dan identitas ormas Bang Japar, yang secara eksplisit menyebutkan nama Fahira Idris dalam slogan dan arahan organisasi, seperti “Satu Visi, Satu Misi, Satu Komando bersama Fahira Idris” yang secara tidak langsung memperkuat relasi hierarkis dan emosional antara patron dan klien.

Selain itu, dalam hal kesetiaan politik, ormas Bang Japar juga turut menjalankan program-program yang membantu mempertahankan dan menguatkan legitimasi sosial Fahira Idris di masyarakat. Seperti halnya pada bulan Juni tahun 2024 lalu, ormas Bang Japar melakukan pengawalan aksi bertajuk jaga aksi bela Palestina yang berlangsung di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Ormas Bang Japar mengerahkan tim pengamanan khusus seperti, tim srikandi yang berisikan anggota perempuan, untuk membantu lalu-lalang massa perempuan di titik aksi. Selain itu, ormas Bang Japar juga menurunkan tim medis serta mobil *ambulance* untuk membantu massa yang membutuhkan pertolongan medis, tim konsumsi yang mendistribusikan paket konsumsi di arena lokasi, serta tim kebersihan untuk membantu membersihkan titik pasca aksi (Marasabessy, 2025).

Relevansi hubungan timbal balik antara ormas Bang Japar dan Fahira Idris dalam konteks aksi bela palestina mencerminkan suatu bentuk penguatan relasi patron klien yang memiliki muatan ideologis, kultural, sekaligus politik. Aksi tersebut bukan hanya untuk solidaritas kemanusiaan, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi ormas Bang Japar sebagai klien untuk menunjukkan dukungan nyata terhadap Fahira Idris, sekaligus mempertegas posisi Fahira sebagai figur yang dekat dengan nilai keislaman dan perjuangan umat, sesuai dengan AD/ART Ormas Bang Japar (2024) yang sarat akan nilai-nilai agama islam.

Budaya organisasi ormas Bang Japar yang erat dengan nilai-nilai islam, keterlibatan dan semangat keumatan menjadikan aksi bela palestina sebagai ruang afirmasi ideologi kolektif. Dengan mendukung dan mengawal Fahira dalam isu-su keumatan seperti ini, ormas Bang Japar tidak hanya memenuhi kewajiban moral sebagai organisasi berbasis Islam, tetapi juga menjalankan fungsi simbolik untuk menjaga posisi Fahira sebagai patron yang dianggap peduli dan sejalan dengan aspirasi

umat islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator dianalisis melalui pendekatan partisipasi elektoral dan non-elektoral tersebut terbukti saling terhubung dan menjadi dasar kuat bagi hubungan Fahira dengan Bang Japar. Ketimpangan kekuasaan terlihat dari posisi Fahira sebagai penyedia sumber daya dan akses politik. Keterikatan personal dibangun melalui komunikasi informal dan perhatian simbolik yang menumbuhkan loyalitas emosional. Ketergantungan tampak dalam akses terhadap program dan dukungan politik Fahira yang dimanfaatkan Bang Japar. Hubungan timbal balik bersifat adaptif dan pragmatis, namun tetap dilandasi oleh norma loyalitas sosial yang memperkuat stabilitas relasi.

Implementasi konkret dari dukungan Bang Japar terlihat dalam kegiatan kampanye, kerja sosial seperti bakti kesehatan dan donor darah, serta advokasi politik yang meningkatkan eksistensi Fahira di mata publik. Aktivitas tersebut memperluas jejaring sosial Fahira dan memperkuat legitimasi politiknya. Penelitian ini menegaskan bahwa ormas dapat menjadi aktor strategis dalam politik elektoral, dan hubungan patron-klien yang terjalin memberi kontribusi signifikan terhadap perolehan suara, sekaligus memperkaya kajian patronase dalam konteks demokrasi Indonesia.

Referensi

- Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Pustaka Belajar.
- Dhakidae, D. (1991). *Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Pilihan Artikel Prisma. Jakarta: LP3ES.
- Feith, H. dan Castles, L. (1998). *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, D. (2012). *Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia Pada Era Reformasi*. Depok: Sosiologi

FISIP Universitas Indonesia.

- Imawan, R. (1996). *Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan di Indonesia*, dalam Reza Noer Arfani (ed) *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishiyama, T. dan Marijke, B. (2013). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sisyem presidensial Indonesia*. (ed 1-2). Jakarta: Rajawali Pers.
- Lili, R. (2017). *Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Orasi pengukuhan professor riset bidang politik dan pemerintahan Indonesia. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal PEMILU*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy (IDW).
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Sjamsuddin, N. (1998). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Snow, A., dkk. (2004). *The Blackwell Companion to Social Movement*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Winarno, D. (2012). *Gerakan Falun Gong di Indonesia*. Depok: Sosiologi FISIP Universitas Indonesia.
- Adrian, F. (2014). Identitas etnis dalam pemilihan kepala daerah (studi pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.

- Jalal, A. (2019). Organisasi Kemasyarakatan dan Politik di Indonesia. *Thesis*. Universitas Nasional.
- Arianto, B. (2019). Kontestasi Relawan Teman Ahok Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. *Journal of Social Politics and Governance*, 1(1).
- Budiman, S. A., & Setyahadi, M. M. (2019). Peran Ormas Islam dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019 (Kajian Pustaka pada Organisasi Islam Terbesar NU dan Muhammadiyah). *Jurnal Renaissance*, 4(02), 560-563.
- Djumadin, Z., & Sulistiawan, P. (2023). Peran Ormas dalam Keterpilihan Pemilihan Legislatif: Studi Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) di Kota Jakarta Selatan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 298-307.
- Fadiyah, D., & Zakiyah, U. (2018). Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 75-88.
- Firzan, M. (2017). Hubungan Patron – Klien Masyarakat Nelayan di Kampung Tanjung Limau Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. *Sosiatri – Sosiologi*, 5(3). Hal. 29 – 43.
- Gumilang. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*. Hal. 154 – 157.
- Hamdani, R., Herdiansyah, A. G., & Bintari, A. (2021). Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Aspirasi*, 11(2), 1-19.
- Hidayat, S. (2019). Dinamika Politik Identitas dan Mobilisasi Basis Massa dalam Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(1). Hal. 32 – 48.
- Hurriyah, H. (2019). The myth of civil society's democratic role: volunteerism and Indonesian democracy. *Jurnal Politik*, 4(2), 15.
- Husen, A. F. (2024). Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 14(2), 262-270.

- Jamil, G. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Judiciary*, 11(1). Hal. 62 – 75.
- Kamal, H. *Relawan Politik Dan Pemilihan Umum: Peran Awak Samo Awak (ASA) dalam Pemenangan Karlena pada Pemilu Legislatif di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kitschelt, H. (2000). Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities. *SageJournals*, 33(6-7).
- Kurniawan, R. (2025). Patronage Networks and Power Disparities: The Legacy of Political Patronage in Indonesia's Governance and Democracy. *Jurnal Politik Profetik*, 13(1), 1-32.
- McCarthy, J. dan Zald, M. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *Chicago Journals*, 82(6).
- Nastain, M. dan Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1). Hal. 167 – 184.
- Sahalatua, A., Hamid, A., dan Hikmawan, M. (2018). Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022).
- Scott, J. (1972). Patron-Client Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Association*, 66(1). Hal. 91 – 113.
- Sucipto, D. (2019). Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut). *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 213-229.
- Sukmana, O. (2013). Konversi antara resource mobilization theory dan identity-oriented theory dalam studi gerakan sosial baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1). Hal. 40 – 62.
- Susilo, M. E., Afifi, S., & Yustitia, S. (2020). Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 6 Nomor 1, September-Februari 2025

ISSN 2721-771X (Online)

<https://doi.org/10.33822/jpds.v6i1>

<https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/>

Pemberantasan Hoaks.

- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J.-O. (1978). *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*. Cambridge University Press
- Widyarini, D. A. (2022). Brokerage dalam Politik Lokal: Karakteristik Patron-Klien Wilayah Abangan pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 109-134.
- Yudhi, D. (2017). Peran Basis Massa dalam Memperoleh Suara di Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 2(1). Hal. 12 – 23.